

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, laporan keuangan adalah laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Seiring berjalannya waktu, fakta mengenai pelaporan keuangan yang ada di Indonesia menjadi suatu hal yang menarik untuk diteliti. Dikarenakan masih saja terdapat kesalahan dalam penyajian laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan elemen yang penting bagi pemerintah yang wajib diperhatikan dalam menyajikan laporan keuangan dan sebagai media bagi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerja keuangannya kepada publik. Instansi Pemerintah Daerah sebagai pengelola dana publik harus mampu menyajikan informasi keuangan secara transparan dan akuntabel (Aditya & Surjono, 2017).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 terdapat karakteristik kualitatif dalam laporan keuangan yang terdiri dari : relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Karakteristik kualitatif laporan keuangan merupakan ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga bisa memenuhi tujuan yang telah ditetapkannya. Apabila suatu laporan keuangan telah memenuhi karakteristik kualitatif tersebut, maka dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Oleh karena itu, laporan keuangan merupakan hal yang sangat penting bagi pemerintahan, dikarenakan menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006, laporan keuangan merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara/daerah selama suatu periode.

Pada tahun 2019, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandar Lampung mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ini telah diraih sebanyak 10 berturut-turut semenjak Walikota Bandar Lampung adalah Herman HN yang mulai menjabat pada tahun 2010 (Bandarlampungkota.go.id, 2020). Sedangkan pada tahun 2021, Pemerintah Kota Bandar Lampung gagal untuk mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Opini yang didapatkan adalah Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dikarenakan terdapat permasalahan baik dalam penyajian materi maupun dalam pos laporan keuangan. Hal tersebut disebabkan banyaknya pengalihan program kerja yang ada disekeliling Organisasi Perangkat Daerah (OPD) (Lampung.poskota.co.id, 2021).

Selain itu, hasil pemeriksaan BPK RI atas IKHTISAR Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2017 pada Kota Bandar Lampung menunjukkan adanya 2 kasus kelemahan SPIP terhadap Daerah terdiri atas 2 kelompok temuan yaitu kelemahan 1 perencanaan kegiatan tidak memadai, 1 lainnya kelemahan sistem pengendalian. Antara lain :

- 1) Hasil pemeriksaan atas kinerja memuat kesimpulan kinerja pelaksanaan pelayanan/kegiatan/program belum sepenuhnya efektif karena masih terdapat permasalahan yang memengaruhi pencapaian tujuan.
- 2) Hasil Pemeriksaan DTT memuat kesimpulan penerapan sistem pengendalian intern belum sepenuhnya memadai untuk mencapai tujuan pengendalian dan masih terdapat ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan (www.bpk.co.id,2017)

Bpk mengungkapkan 4.430 temuan yang memuat 5.852 permasalahan, meliputi 1.082 (19%) permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) dan 1.950 (33%) permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp10,56 triliun, serta 2.820 (48%) permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan senilai Rp2,67 triliun.

Dari permasalahan ketidakpatuhan itu, sebanyak 1.452 (74%) senilai Rp10,56 triliun merupakan permasalahan ketidakpatuhan yang mengakibatkan :

- kerugian sebanyak 840 (58%) permasalahan senilai Rp1,46 triliun
- potensi kerugian sebanyak 253 (17%) permasalahan senilai Rp5,04 triliun
- kekurangan penerimaan sebanyak 359 (25%) permasalahan senilai Rp4,06 triliun.

Selain itu, terdapat 498 (26%) permasalahan ketidakpatuhan yang mengakibatkan penyimpangan administrasi.

Terhadap permasalahan ketidakpatuhan tersebut, BPK merekomendasikan kepada para pemimpin entitas agar menyusun dan menetapkan pedoman/*standard operating procedure* (SOP)/ petunjuk teknis (juknis) yang diperlukan, memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada pejabat/petugas yang lalai serta menagih kerugian dan kekurangan penerimaan/pendapatan yang terjadi untuk kemudian menyertakan ke kas negara/daerah. Selama proses pemeriksaan, entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti dengan menyerahkan aset atau menyertakan ke kas negara/ daerah/ perusahaan senilai Rp65,91 miliar (0,62%) (Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2017 Kota Bandar Lampung).

Berdasarkan keadaan yang telah dijelaskan sebelumnya, menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan dan kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan. Apabila laporan keuangan yang dihasilkan tidak berkualitas berarti tidak memenuhi syarat dari karakteristik kualitatif laporan keuangan sehingga laporan keuangan yang dihasilkan belum dapat disediakan dengan baik dan berkualitas.

Faktor pertama yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah sistem pengendalian *intern*. Menurut Safiri & Zulkarnain (2021) menjelaskan bahwa sistem pengendalian internal dalam akuntansi mempunyai peranan yang penting, karena sistem pengendalian internal adalah suatu prosedur atau sistem yang dirancang untuk mengontrol, mengawasi dan mengarahkan organisasi agar bisa mencapai suatu tujuan. Selain itu, sistem pengendalian internal ini juga bisa dipergunakan

oleh manajemen untuk merencanakan dan mengendalikan operasi perusahaan, membantu menyajikan informasi akuntansi yang handal untuk laporan keuangan dan menjamin dipatuhinya hukum serta peraturan yang berlaku.

Dengan melakukan penerapan sistem pengendalian *intern* mampu meningkatkan reliabilitas, objektivitas informasi dan memudahkan proses audit laporan keuangan. Kualitas laporan keuangan yang baik dapat dilihat dari seberapa baik nya pengendalian internal yang telah diterapkan.

Faktor kedua yang mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan adalah Kualitas Sumber Daya Manusia. Menurut Roshanti, Sujana & Sinarwati (2014) menjelaskan bahwa sumber daya manusia yang berkualitas dapat menghemat waktu pembuatan laporan keuangan, disebabkan karena sumber daya manusia tersebut telah mengetahui dan memahami apa yang akan dikerjakan dengan baik dan sesuai bidangnya sehingga penyajian laporan keuangan bisa tepat waktu. Semakin cepat waktu penyajian laporan keuangan, maka semakin baik untuk pengambilan keputusan.

Faktor ketiga yang mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan adalah Peran Auditor Internal. Menurut (Nazaruddin & Syahril, 2017) menjelaskan bahwa Dalam menjalankan tugasnya seorang auditor internal harus secara terus-menerus meningkatkan kemahiran profesi, keefektifan dan kualitas hasil pekerjaan, sehingga dengan mahirnya seorang auditor pada profesinya maka semakin menguatkan sistem pengawasan pada penyusunan laporan keuangan. Peran audit internal merupakan salah satu kunci dalam unit pemerintah yang memiliki keahlian untuk menilai efektivitas pemanfaatan pemerintahan yang sumber daya keuangan dengan mengidentifikasi pemborosan, inefisiensi, dan kecurangan dalam anggaran serta untuk membuat rekomendasi untuk meningkatkan efisiensi operasional dan meningkatkan audit kualitas laporan keuangan. Menurut Sukrisno Agoes (2017:238) audit internal adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan, terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen puncak yang telah

ditentukan dan ketaatan terhadap peraturan pemerintahan dan ketentuan-ketentuan dari ikatan profesi yang berlaku.

Penelitian ini mengacu pada penelitian (Tanjung & Sonia, 2021) dengan judul Sistem Pengendalian Internal dan Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Pemerintah Kota Cimahi. Pada penelitian ini membuktikan bahwa Sistem Pengendalian Internal dan Kualitas Sumber Daya Manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Yang membedakan penelitian ini adalah penambahan variabel Peran Auditor Internal, dan studi kasus dilakukan pada Dinas-Dinas di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Bandar Lampung. Penambahan variabel tersebut, didasarkan pada penelitian (Nazaruddin & Syahrial, 2017) yang meneliti tentang Pengaruh Peran Audit Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Berdasarkan fenomena dan latar belakang dan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Peran Auditor Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung)”**.

1.2 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini hanya sebatas dilakukan di Dinas-dinas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Bandar Lampung. Penelitian ini hanya membahas apakah Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Kualitas Sumber Daya Manusia dan Peran Auditor Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut maka dapat dirumuskan masalah berikut :

1. Apakah terdapat pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah ?
2. Apakah terdapat pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah ?
3. Apakah terdapat pengaruh peran auditor internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah ?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
2. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
3. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh peran auditor internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat menambah pemahaman dan pengetahuan sehingga dapat menjadi bahan pemikiran dalam pengembangan ilmu akademik dan dapat dijadikan referensi atau bukti tambahan untuk peneliti-peneliti selanjutnya yang akan meneliti tentang topik yang sama, dan dapat menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya.

1.5.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi pembaca, menyediakan informasi terkait sistem pengendalian internal, kualitas sumber

daya manusia dalam hubungannya dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dapat digunakan bagi penulis, bagi instansi-instansi atau pihak lain.

b. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kontribusi sebagai bahan masukan dan gambaran tentang sistem pengendalian internal, kualitas sumber daya manusia dan peran auditor internal pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, pembahasan dan penyajian hasil penelitian akan disusun dengan materi sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan tentang “pengaruh sistem pengendalian internal, kualitas sumber daya manusia dan peran auditor internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah”

Bab II : Landasan Teori

Bab ini berisikan tentang teori yang berhubungan dengan sistem pengendalian internal, kualitas sumber daya manusia dan peran auditor internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Bab III : Metode Penelitian

Bab ini berisikan tentang jenis dari penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, populasi, sampel, variabel penelitian, definisi operasional, variabel, metode analisis data, serta pengujian hipotesis mengenai pengaruh sistem pengendalian internal, kualitas sumber daya manusia dan peran auditor internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Bab IV : Hasil dan Pembahasan

Dalam bab ini disajikan hasil, implementasi, analisis, dan pembahasan penelitian. Hasil dan implementasi dapat berupa gambar alat/program dan aplikasinya. Untuk penelitian lapangan hasil dapat berupa data (kualitatif maupun kuantitatif). Analisis dan pembahasan berupa hasil pengolahan data.

Bab V : Simpulan dan Saran

Dalam bab ini disajikan simpulan dan saran dari hasil pembahasan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN